

## Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis

Dian Purnama Sarius,<sup>1</sup> Jeni Wardi,<sup>2</sup> Ryan Pahlawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Lancang Kuning

Korespondensi Penulis:

Email: diansarius@gmail.com

### ARTICLE INFO

#### Article History

Submission: 4th Marc 2025

Accepted: 18th March 2025

Published: 31th March 2025

#### Keywords:

Accountability;

Transparency;

Regional Government Performance



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

### ABSTRACT

*The aim of this research is to analyze the influence of accountability and transparency in regional financial management on the performance of the Bengkalis Regency regional government. The population in this study are employees involved in financial management in all Regional Work Units (SKPD) of the Bengkalis Regency government. The samples in the research were Echelon 3 and Echelon 4 officials in the Bengkalis Regency Government SKPD. The sampling technique used was purposive sampling. Data collection techniques using questionnaires and distribution using Google Form. The data analysis technique in this research is Structural Equation Modeling (SEM) using SmartPLS 3.0 as a data processing tool. The results of this research show that accountability and transparency have proven to influence the performance of the Bengkalis Regency regional government. The Adjusted R Square value is 0.759, meaning that 75.9% of the dependent variable on regional government performance is influenced by the independent variables consisting of accountability and transparency.*

### PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang merujuk pada otoritas pemerintahan di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara, dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas Provinsi, Kabupaten dan Kota. Provinsi, kabupaten, dan kota tersebut memiliki pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan sumber daya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya berdampak pada keberhasilan pembangunan, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Namun, tantangan dalam hal Akuntabilitas dan transparansi keuangan seringkali menjadi hambatan bagi tercapainya kinerja pemerintah daerah yang optimal.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan suatu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di suatu daerah. Pada prinsipnya Undang-Undang tersebut mengubah sistem penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat dengan meningkatkan pemberdayaan, peran masyarakat dan layanan publik untuk masyarakat. Pemerintah Daerah merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang merujuk pada otoritas pemerintahan di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara, sehingga negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas Provinsi,



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Kabupaten dan Kota. Provinsi, kabupaten, dan kota tersebut memiliki pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang. *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep yang menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. *Good governance* bukan hanya tentang bagaimana pemerintahan menjalankan fungsi-fungsinya, tetapi juga tentang bagaimana pemerintahan tersebut menjamin bahwa segala proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya dilakukan secara etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendukung kemakmuran masyarakat (Zanra et al., 2020). Menurut (Mardiasmo, 2018a) karakteristik pelaksanaan *Good Governance meliputi Transparency, Responsiveness, Consensus Orientation, Equity, Efficiency dan Effectiveness, serta Accountability*. Dari karakteristik-karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal, yang dapat diperankan oleh Akuntansi Sektor Publik antara lain terwujudnya Transparansi, *Value For Money*, dan Akuntabilitas.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, merupakan ketentuan implementatif penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Pelaksanaan pemerintah daerah harus didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya dapat mendukung proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah, dan analisis informasi pemerintahan daerah lainnya. Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi, maka diharapkan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, akuntabel, responsif, serta dapat dipercaya sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Tujuan penerbitan Permendagri No 90 tahun 2019 tersebut antara lain untuk menyediakan statistik keuangan pemerintah daerah, melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keaugan daerah, mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta dapat membantu keterbukaan informasi kepada masyarakat maupun pihak yang berkepentingan.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk Akuntabilitas publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan terkait lainnya yang mengharuskan setiap pemerintah daerah menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara akurat, transparan dan memberikan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan termasuk pemerintah pusat, legislative, auditor serta masyarakat. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam suatu periode. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini disusun sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan daerah adalah untuk menyajikan informasi berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan perubahan ekuitas pemerintah daerah yang berguna bagi pengambil keputusan dan untuk menunjukkan Akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang telah dialokasikan yang memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah, memastikan keterbukaan dalam



pengelolaan anggaran dan membangun kepercayaan publik. Pengelolaan keuangan daerah memerlukan suatu pengukuran kinerja untuk menilai Akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik (Matulatuwa et al., 2024).

Prinsip Akuntabilitas telah diterapkan luas dalam sektor publik untuk mencapai tata kelola yang baik. Akuntabilitas mencakup tidak hanya bidang keuangan, tetapi juga aspek hukum, program, proses, dan hasil (Hartati & Fanggidae, 2020). Selain itu, Akuntabilitas tidak hanya terkait dengan proses, kinerja, dan manajemen, tetapi juga dengan pengelolaan keuangan yang efisien dan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Tingkat Akuntabilitas keuangan dapat diukur berdasarkan seberapa rendah tingkat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Prinsip transparansi memiliki dua komponen utama dalam membentuk pemerintahan yang terbuka terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, yaitu melalui komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat untuk mengakses informasi (Maulamin et al., 2019). Kedua aspek ini sulit dilakukan tanpa manajemen kinerja yang baik, yang menjadi dasar dari transparansi. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Transparansi harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Pemerintah daerah seharusnya perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi (Riswanto, 2016).

Pengukuran kinerja suatu instansi pemerintah harus memiliki kaitan erat dengan Akuntabilitas dan transparansi. Dalam memantapkan mekanisme Akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melihat kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi, dan melihat kinerja organisasi publik dari perspektif pengguna jasa organisasi publik. Menurut Mardiasmo (2018a) Khusus mengenai organisasi publik berkaitan erat dengan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, Akuntabilitas, serta persamaan pelayanan. Penerapan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan konsep Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada masyarakat. Implementasi Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri.

Pemerintah Daerah Bengkalis sebagai salah satu daerah di Indonesia dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan kinerja melalui penerapan prinsip-prinsip Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat kekhawatiran terkait efektivitas implementasi prinsip-prinsip ini dalam mencapai kinerja yang lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat. Pelaksanaan Akuntabilitas dan transparansi di Kabupaten Bengkalis juga di implementasikan dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). SIPD RI merupakan inovasi dari Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan untuk menyatukan data perencanaan, keuangan dan pelaporan daerah yang diharapkan dapat membuat layanan pemerintahan lebih efektif dan efisien. Penggunaan SIPD RI di Kabupaten Bengkalis bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh sistem informasi pemerintah daerah ke dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel demi mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang bermartabat, maju dan sejahtera. Ada beberapa orang didalam SKPD yang terlibat didalam penggunaan Aplikasi ini antara lain Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran, Sekretaris sebagai PPK SKPD yang mengverifikasi dan mengesahkan transaksi keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Bendahara SKPD dan staf tenaga akuntansi sebagai operator. Seharusnya semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bengkalis memiliki persepsi dan pengetahuan yang sama dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat tersebut, namun pada pelaksanaannya pengguna aplikasi lebih didominasi oleh tenaga akuntansi sebagai operator.

## **TELAAH PUSTAKA**

### **Transparansi**

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam berbagai aspek kehidupan yang menekankan keterbukaan dalam penyampaian informasi yang akurat, dapat diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau pihak berkepentingan. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, transparansi menjadi semakin penting guna menciptakan sistem yang lebih akuntabel dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dalam sistem pemerintahan, transparansi menjadi elemen kunci dalam menciptakan tata kelola yang baik. Pemerintah yang transparan memberikan akses informasi yang jelas kepada masyarakat terkait kebijakan publik, pengelolaan anggaran, serta pengambilan keputusan strategis. Keberadaan mekanisme transparansi seperti open data, audit publik, dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dapat mengurangi risiko korupsi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Hood, 2006). Dalam konteks bisnis, transparansi memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan antara perusahaan dan pemangku kepentingan seperti investor, konsumen, serta mitra bisnis. Perusahaan yang menerapkan prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan, pengungkapan risiko, serta kebijakan internal cenderung lebih dipercaya oleh pasar.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menekankan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakan yang diambil. Dalam berbagai sektor, baik pemerintahan, bisnis, maupun organisasi sosial, akuntabilitas menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Prinsip ini berkaitan erat dengan kepercayaan, efisiensi, serta efektivitas dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan (Bovens, 2007). Dalam pemerintahan, akuntabilitas menjadi faktor utama dalam menciptakan tata kelola yang baik. Pejabat publik diharapkan untuk memberikan laporan yang jelas terkait kebijakan yang diterapkan, penggunaan anggaran, serta dampak yang dihasilkan dari keputusan yang diambil. Akuntabilitas dalam sektor ini bertujuan untuk mengurangi korupsi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan bahwa kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama (Mulgan, 2000).

### **Keuangan Daerah**

Keuangan daerah merupakan seluruh aspek yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan di tingkat pemerintahan daerah, yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pengawasan. Keuangan daerah menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada regulasi yang mengatur bagaimana pemerintah daerah memperoleh, mengelola, dan menggunakan dana untuk kepentingan masyarakat secara transparan dan akuntabel (Mardiasmo, 2018a). Pemahaman mengenai keuangan daerah



sangat penting karena menentukan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Sumber pendapatan daerah berasal dari berbagai komponen, termasuk pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan sumber pendapatan lain yang sah. PAD mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain pendapatan yang sah.

## METODA PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, teori sangat penting digunakan guna menuntun peneliti menemukan masalah penelitian, hipotesis, konsep-konsep, metodologi dan menemukan alat-alat analisis data yang kemudian digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Bungin, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kabupaten Bengkalis sebanyak 49 SKPD yang terdiri dari 34 Dinas dan Badan, 2 RSUD dan 13 Kecamatan. Sampel dalam penelitian adalah pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sample*. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 pada semua SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis yaitu Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Keuangan yang telah menjabat minimal 1 tahun sebanyak 98 orang dari 49 SKPD di Kabupaten Bengkalis.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Kuesioner terstruktur dilakukan untuk memperoleh informasi dari responden mengenai variabel penelitian (Prastowo, 2011).

## Definisi Operasional Variabel

### a. Akuntabilitas (X1)

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak agen (pemegang amanah) untuk mempertanggung jawabkan dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak principal (pemberi amanah) yang memiliki hak serta kewenangan untuk meminta pertanggungjawabannya (Mardiasmo, 2018b). Indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut (Krina, 2012):

- 1) Mekanisme dan aturan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi :
  - a. mekanisme proses penganggaran
  - b. mekanisme dalam konsep dan indikator kinerja anggaran
  - c. standar biaya
- 2) Mekanisme pertanggung jawaban, pelaporan, dan evaluasi
- 3) Mekanisme pengendalian
- 4) Mekanisme pengawasan dan pemeriksaan.

### b. Transparansi (X2)

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan informasi bagi setiap orang atau pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang sedang berlangsung, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya (Krina, 2012).

Indikator transparansi adalah sebagai berikut:

- 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua



proses-proses pelayanan publik;

- 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik;
- 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayan (Krina, 2012; Riswanto, 2016).

**c. Kinerja Instansi Pemerintah (Y)**

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan ataupun sasaran instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi serta strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (MenPAN:2007). Kinerja adalah hasil kerja atau pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang telah tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi (Cholis & Fadli, 2021).

Indikator kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

- 1) Kesesuaian dengan standar pengelolaan keuangan,
- 2) Pencapaian target kinerja dari suatu program,
- 3) Pencapaian efesiensi operasional,
- 4) Ketepatan dan kesesuaian hasil,
- 5) Tingkat pencapaian program
- 6) Dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat, dan
- 7) Moral perilaku pegawai

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pengujian Instrumen Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui kuesioner kepada responden maka perlu diuji kelayakan dari masing masing variabel dan indikator indikator tersebut atau dapat juga dikatakan sebagai pengujian kualitas data yang bertujuan untuk menentukan batas-batas kebenaran ketepatan alat ukur (kuesioner) suatu indikator variabel penelitian (Ghozali, 2013).

**a. Uji Validitas**

Untuk menguji validitas instrumen, penulis menggunakan analisis dengan SPSS. Berikut hasil pengujian validitas, untuk tingkat validitas dilakukan uji signifikansi dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel.

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Akuntabilitas	X1.1	0,223	0,199	valid
	X1.2	0,491	0,199	valid
	X1.3	0,461	0,199	valid
	X1.4	0,549	0,199	valid
	X1.5	0,537	0,199	valid
	X1.6	0,657	0,199	valid
	X1.7	0,466	0,199	valid
	X1.8	0,732	0,199	valid
	X1.9	0,856	0,199	valid
	X1.10	0,572	0,199	valid



Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Transparansi	X1.11	0,871	0,199	valid
	X1.12	0,407	0,199	valid
	X2.1	0,678	0,199	valid
	X2.2	0,610	0,199	valid
	X2.3	0,612	0,199	valid
	X2.4	0,725	0,199	valid
Kinerja pemerintah daerah	X2.5	0,726	0,199	valid
	X2.6	0,512	0,199	valid
	Y1	0,334	0,199	valid
	Y2	0,442	0,199	valid
	Y3	0,369	0,199	valid
	Y4	0,595	0,199	valid
	Y5	0,366	0,199	valid
	Y6	0,644	0,199	valid
	Y7	0,480	0,199	valid
	Y8	0,360	0,199	Valid
	Y9	0,320	0,199	Valid
	Y10	0,602	0,199	Valid
	Y11	0,405	0,199	Valid
	Y12	0,467	0,199	Valid
Y13	0,698	0,199	Valid	
Y14	0,599	0,199	Valid	

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel di atas hasil uji validitas variabel akuntabilitas, transparansi dan kinerja pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa masing masing item pernyataan dalam penelitian ini valid, artinya semua item dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

### b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya, atau dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode Alpha (Cronbach's). Instrumen dikatakan reliabel bila koefisien kehandalannya ( $\alpha$ ) lebih dari 0,6 dengan kriteria tinggi (Hartono, Jogiyanto, 2020). Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan dua cara di atas adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.** Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha (Cronbach's)	Kriteria	Keterangan
akuntabilitas(X1)	0,820	0,60	Reliabel
Transparansi (x2)	0,709		
Kinerja Pemerintah Daerah(Y)	0,728	0,60	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2025)

Dari hasil analisis di atas didapat nilai alpha variabel akuntabilitas, variable transparansi dan variable kinerja pemerintah daerah lebih besar dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel instrumen penelitian tersebut reliabel.

### c. Uji Asumsi Klasik

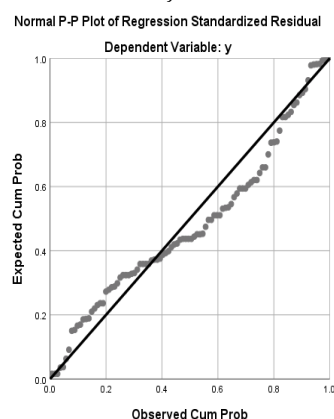


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui kenormalan distribusi data. Uji asumsi normalitas dapat dilihat dari grafik *Normal Probability Plot*. Apabila data tersebut disekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, dan apabila data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

**Gambar 1. Uji Normalitas**



Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2025)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa data tersebut terdistribusi secara normal, dasar pengambilan keputusan dengan uji normalitas dengan menggunakan grafik *P-P Plot*. Di dalam penelitian ini pola distribusi sudah normal, karena mengikuti arah garis diagonal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain dengan menggunakan grafik p-plot, uji normalitas juga dapat dilakukan dengan metode KolmogorovSmirnov (K-S).

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual	
N		98	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.40862750	
Most Extreme Differences	Absolute	.123	
	Positive	.123	
	Negative	-.077	
Test Statistic		.123	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 <sup>c</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.097 <sup>d</sup>	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.089
		Upper Bound	.104

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.



Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2025)

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test memiliki nilai Asymp.Sig (2- tailed) atas nilai residual sebesar 0,104. Nilai ini kemudian dibandingkan menggunakan taraf signifikansi atau  $\alpha = 5\%$ , yaitu 0,05. Data dapat dikatakan normal jika signifikansi lebih besar dari 5%. Hasil uji normalitas di dapat nilai signifikansi 0,104 > 0,05, nilai signifikansi lebih besar sehingga dapat disimpulkan bahwa data diatas berdistribusi normal.

## 2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi antara lain dapat dilihat dari VIF (*Variance Inflation Factor*) dan Tolerance. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas pada model regresi, dapat dilihat dari jika nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) tidak melebihi 10, maka model regresi bebas dari multikolinieritas. Dan jika nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10, maka model regresi bebas dari multikolinieritas

**Tabel 4.** Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	16.083	2.362		6.808	.000		
x1	.637	.051	.715	12.577	.000	.768	1.301
x2	.434	.093	.266	4.675	.000	.768	1.301

a. Dependent Variable: y

Sumber: Hasil Output Uji SPSS (2025)

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat nilai tolerance variabel akuntabilitas sebesar 0,768 dan variabel transparansi sebesar 0,768. Sementara itu, nilai VIF variabel akuntabilitas dan transparansi masing masing sebesar 1,301. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa variabel bebas memiliki hasil tolerance 0,768 > 0,10. Dan nilai VIF variabel bebas adalah 1,301 < 10, ini berarti hasil itu menyimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam penelitian.

## 3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson. Secara umum untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW)

Kriteria dalam pengujian Durbin Watson yaitu Sujarweni (2016):

1. Jika  $0 < d < dL$ , berarti ada autokorelasi positif
2. Jika  $4 - dL < d < 4$ , berarti ada auto korelasi negative
3. Jika  $2 < d < 4 - dU$  atau  $dU < d < 2$ , berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif
4. Jika  $dL \leq d \leq dU$  atau  $4 - dU \leq d \leq 4 - dL$ , pengujian tidak meyakinkan. Untuk itu dapat digunakan uji lain atau menambah data



5. Jika nilai  $du < d < 4-du$  maka tidak terjadi autokorelasi

**Tabel 5.** Hasil Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.874 <sup>a</sup>	.764	.759	2.434	1.798

a. Predictors: (Constant), x2, x1

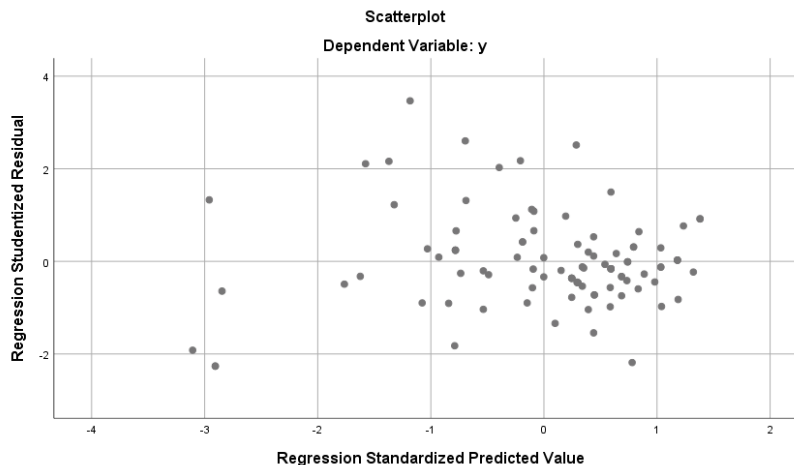
b. Dependent Variable: y

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai Durbin Watson pada Model Summary adalah sebesar 1,798. Jadi karena  $1,7128 < 1,798 < 2$  maka tidak terjadi autokorelasi, sehingga model ini layak digunakan.

**4) Uji Heterokedastisitas**

Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain maka perlu dilakukan uji heterokedasitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah pengujian dengan menggunakan Scatter Plot. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.2:

**Gambar 2.** Scatterplot



Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2025)

Berdasarkan hasil uji scatterplot diatas, grafik menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik tidak membentuk sebuah pola, sehingga dapat dikatakan data tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas.

**Uji Hipotesis**

**a. Analisis Regresi Linear Sederhana**

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variable akuntabilitas dan transparansi terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. Adapun persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:  $Y = a + b1X1 + b2X2 + \epsilon$



**Tabel 6.** Hasil Uji Regresi Linear Sederhana  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.083	2.362		6.808	.000
	x1	.637	.051	.715	12.577	.000
	x2	.434	.093	.266	4.675	.000

a. Dependent Variable: y

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2025)

Dari hasil pengolahan dengan SPSS seperti terlihat pada tabel 6 di atas dapat diperoleh persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 16,083 + 0,637X_1 + 0,434 X_2$$

1. Konstanta sebesar 16,083 hal ini menunjukkan apabila variabel bebas (Akuntabilitas dan transparansi) nilainya adalah 0, maka variabel terikat Y (kinerja pemerintah daerah) nilainya yaitu sebesar 16,083.
2. Koefisien regresi variabel X1 (Akuntabilitas) sebesar 0,637 menunjukkan bahwa apabila Akuntabilitas mengalami kenaikan sebesar 1 poin maka kinerja pemerintah daerah juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,637. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Akuntabilitas dengan kinerja pemerintah daerah, semakin baik Akuntabilitas pegawai maka kinerja pemerintah daerah juga akan semakin naik.
3. Koefisien regresi variabel X2 (transparansi) sebesar 0,434 menunjukkan bahwa apabila transparansi mengalami kenaikan sebesar 1 poin maka kinerja pemerintah daerah juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,434. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara transparansi dengan kinerja pemerintah daerah, semakin baik transparansi maka kinerja pemerintah daerah juga akan semakin naik.

#### b. Uji Determinasi R Square (R<sup>2</sup>)

Nilai koefisien determinasi atau R Square (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh variabel bebas (Akuntabilitas dan transparansi) terhadap variabel terikat (kinerja pemerintah daerah). Dari hasil pengolahan dengan SPSS diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 7.** Hasil Analisis Koefisien Determinasi  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.874 <sup>a</sup>	.764	.759	2.434

a. Predictors: (Constant), x2, x1

b. Dependent Variable: y

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2025)

Berdasarkan tabel 7 di atas nilai R Square atau koefisien determinasi adalah 0,764 . Nilai R Square berkisar antara 0 sampai 1. Semakin besar nilai R2 maka semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Angka Adjusted R Square adalah 0,759 artinya 75,9% variabel terikat kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh Variabel bebas yang terdiri dari akuntabilitas dan transparansi dan



sisanya 24,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

### c. Uji t (Parsial)

Uji ini digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas (Akuntabilitas dan transparansi ) terhadap variabel terikat (kinerja pemerintah daerah). Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 7 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### 1. H1: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas terbukti berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, dengan nilai t-statistik sebesar  $12,577 > 1.985251004$  (t-tabel), dan sig sebesar  $0,000 < 0,05$ . Nilai koefisien pengaruh sebesar 0,637 menunjukkan adanya pengaruh positif. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) dapat diterima, yang berarti akuntabilitas (X1) memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis

#### 2. H2: Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Transparansi terbukti berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, dengan nilai t-statistik sebesar  $4,675 > 1.985251004$  (t-tabel), dan sig sebesar  $0,000 < 0,05$ . Nilai koefisien pengaruh sebesar 0,434 menunjukkan adanya pengaruh positif. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) dapat diterima, yang berarti transparansi (X2) memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis

### c. Uji F (simultan)

Untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh secara simultan atau bersama-sama akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Pengambilan keputusan menggunakan 2 cara:

1. H0: Jika Sig.  $> 0,05$  dan Jika Fhitung  $< F$ tabel maka hipotesis ditolak
2. H1: Jika Sig.  $< 0,05$  dan Jika Fhitung  $> F$ tabel maka hipotesis diterima

**Tabel 8.** Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		ANOVA <sup>a</sup>				Sig.
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	
1	Regression	1823.950	2	911.975	153.956	.000 <sup>b</sup>
	Residual	562.744	95	5.924		
	Total	2386.694	97			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x2, x1

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2025)

Dalam tabel anova diperoleh nilai sig. sebesar 0,000 dibandingkan dengan taraf signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ) 0,05, maka  $0,000 < 0,05$ , dan Fhitung diperoleh sebesar 153, 956 dan Ftabel diperoleh sebesar 3,09. Maka Fhitung ( $19,237$ )  $> F$ tabel ( $3,09$ ) maka tolak H0, terima H1 yaitu hipotesis diterima. Hal ini berarti akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.

## Pembahasan

### Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Pengaruhnya positif berbanding lurus dengan nilai koefisiennya, dengan asumsi semakin baik akuntabilitas maka semakin baik juga kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas adalah memberikan pertanggungjawaban kepada publik terkait pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang telah berlangsung setiap periodenya. Akuntabilitas tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan pemerintah dalam mengelola keuangan pemerintah itu sendiri, maka hal ini menjadi kewajiban bagi pelaksana pemerintahan. Penilaian terhadap pertanggungjawaban tersebut akan dilakukan oleh publik ataupun institusi pengawasan yang mempunyai konsekuensi hukum, maka aparatur pelaksana pemerintahan akan berupaya menerapkan konsep Akuntabilitas tersebut dalam pengelolaan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan.

Penerapan Akuntabilitas dengan berbagai indikatornya ini dalam pengelolaan keuangan secara langsung akan meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Semakin tinggi tingkatan akuntabel pengelolaan keuangan suatu daerah maka akan semakin baik tingkat pencapaian kinerja pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Riswanto, 2016) menyatakan bahwa Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas yang dilakukan secara baik, sesuai, dipertanggungjawabkan, dan diawasi dalam prosesnya maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya (Shara et al., 2020; Sitta et al., 2023; Sufiati et al., 2024) menyatakan bahwa Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah, maka akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat dirumuskan hipotesis yang akan diajukan.

### **Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah'**

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Pengaruhnya positif berbanding lurus dengan nilai koefisiennya, dengan asumsi semakin baik akuntabilitas maka semakin baik juga kinerja pemerintah daerah. Perwujudan transparansi sebagai amanat peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan pemerintahan telah memberikan tekanan kepada aparatur pengelola pemerintahan untuk membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewajiban aparatur pengelola pemerintahan untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengetahui, memberikan masukan, serta dapat mengevaluasi dan menilai kinerja aparatur pemerintah. Dengan begitu aparatur lebih bekerja hati-hati sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Riswanto, 2016) dan (Shara et al., 2020; Sufiati et al., 2024) yang menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa transparansi yang diberikan kepada publik dan pihak yang berkepentingan lainnya telah sesuai, benar, dan seksama, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya (Azizah & Hidayat, 2023; Sitta et al., 2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat transparansi pengelolaan keuangan, maka kinerja



pemerintah daerah akan semakin baik.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-statistik sebesar 12,577 yang lebih besar dari t-tabel (1,985251004) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien pengaruh sebesar 0,637 menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas, maka kinerja pemerintah daerah juga akan meningkat. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima. Selain itu, transparansi juga terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, dengan nilai t-statistik sebesar 4,675 yang lebih besar dari t-tabel (1,985251004) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien pengaruh sebesar 0,434 menunjukkan bahwa transparansi dalam pemerintahan turut meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) juga dapat diterima.

Nilai R Square sebesar 0,764, yang berarti bahwa 76,4% variasi kinerja pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas dan transparansi, sedangkan sisanya sebesar 23,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,759 mengindikasikan bahwa model penelitian ini memiliki tingkat keandalan yang cukup tinggi dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Selain itu, nilai Fhitung sebesar 153,956 lebih besar dari Ftabel sebesar 3,09, sehingga hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (H1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.

## REFERENSI

- Azizah, S. N., & Hidayat, M. T. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Organisasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Surabaya. *Journal of Student Research*, 1(2), 155–175. <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i2.976>
- Bovens, M. (2007). *Analysing and assessing accountability: A conceptual framework*. *European Law Journal*, 13(4), 447-468.
- Bungin, B. (2017). *Komunikasi Pariwisata (Tourism Communication): Pemasaran dan. Brand. Destination*. Kencana.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS21*. Universitas Diponegoro.
- Hartati, A., & Fanggidae. (2020). Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori dan Aplikasi. In *Media Sains Indonesia* (Vol. 1, Issue July).
- Hartono, Jogiyanto, A. W. (2020). *Konsep dan Aplikasi Structural Equation Modeling Berbasis Varian dalam Penelitian Bisnis* (2nd ed.). UPP STIM YKPN - Yogyakarta.
- Hood, C. (2006). *Transparency in historical perspective*. *Public Administration*, 80(4), 693-710.
- Krina, L. L. (2012). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo. (2018a). *Otonomi, and Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI .
- Mardiasmo, M. (2018b). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI.



- Matulatuwa, A., Pelamonia, J. T., & Asrida, W. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah. *Journal of Applied Accounting (JAA)*, 3(1), 5–9.
- Maulamin, T., Cholik, A., & Alawiah, E. T. (2019). pengaruh prinsip-prinsip good corporate governance terhadap pengelolaan anggaran pada instansi pemerintah (Studi Pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten). *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 259–282. <https://doi.org/10.31334/trans.v1i2.308>
- Mulgan, R. (2000). *Accountability: An ever-expanding concept?* *Public Administration*, 78(3), 555-573.
- Prastowo, A. (2011). *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Riswanto, N. (2016). Analysis of Accountability and Transparency of Financial Management on Local Government Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1–7.
- Shara, Y., Ovami, D. C., & Humairah, R. (2020). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value For Money Padarsud Djoelham Binjai. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 13–17.
- Sitta, B., Paulus, D., & Hadiprajitno, T. B. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money Pada Instansi Pemerintah Kota Surakarta. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4), 1–7.
- Sufiati, sambo, E. marin, Wiyana, & Pattikaloba, A. S. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Surabaya. *Akuntansi*, 2(4), 361–375. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i4.1498>
- Zanra, S. W., Tanjung, A. R., & Silfi, A. (2020). The Effect Of Good Corporate Governance Mechanism, Company Size, Leverage And Profitability For Carbon Emission Disclosure With Environment Performance As Moderating Variables. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 148–164. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>